

Legitimasi Pemerintah dalam Perspektif Demokrasi Modern: Analisis atas Partisipasi Publik dan Akuntabilitas Politik

Sumitro^{1*}, Yorman^{2*}

¹Program Studi Pendidikan Sosialogi, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas Mataram

²Program Studi Ilmu Komputer, Fakultas Teknik, Universitas Bumigora

^{1*}sumitro54@gmail.com, ^{2*}yormanman@gmail.com



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 3, No. 5 Oktober 2024

Page: 243-251

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/1578>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v3i5.1578>

Article History:

Received: 05-09-2024

Revised: 28-09-2024

Accepted: 04-10-2024

Abstrak : Legitimasi pemerintah merupakan fondasi utama bagi stabilitas politik dan keberlangsungan sistem demokrasi modern. Dalam konteks globalisasi dan keterbukaan informasi, legitimasi tidak lagi hanya ditentukan oleh proses elektoral formal, tetapi juga oleh sejauh mana pemerintah mampu melibatkan publik dan mempertanggungjawabkan kebijakan secara transparan. Penelitian ini menganalisis hubungan antara partisipasi publik dan akuntabilitas politik sebagai dua pilar penting dalam memperkuat legitimasi pemerintah. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif dan telaah pustaka kritis, penelitian ini mengeksplorasi mekanisme partisipasi warga negarabaik melalui pemilu, forum deliberatif, maupun gerakan sosialserta efektivitas mekanisme akuntabilitas politik seperti pengawasan parlemen, media independen, dan sistem hukum yang adil. Hasil analisis menunjukkan bahwa peningkatan kualitas partisipasi publik dan penguatan akuntabilitas politik tidak hanya memperkuat legitimasi pemerintah, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi. Kajian ini menegaskan pentingnya inovasi dalam tata kelola pemerintahan dan adaptasi terhadap tuntutan masyarakat modern untuk menjaga relevansi demokrasi di tengah tantangan populisme, disinformasi, dan krisis kepercayaan politik. Temuan ini memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam memahami dinamika legitimasi pemerintah dan arah perkembangan demokrasi di abad ke 21.

Kata Kunci : legitimasi pemerintah, demokrasi modern, partisipasi publik, akuntabilitas politik, kepercayaan publik, tata kelola pemerintahan.

PENDAHULUAN

Dalam sistem politik modern, legitimasi pemerintah merupakan fondasi yang menentukan keberlangsungan suatu negara dan kualitas demokrasinya. Legitimasi bukan hanya sekadar pengakuan formal atas kekuasaan yang dimiliki pemerintah, tetapi juga mencakup kepercayaan publik terhadap proses, kebijakan, dan praktik pemerintahan yang dijalankan. Dalam era demokrasi modern yang ditandai oleh keterbukaan informasi, globalisasi, dan meningkatnya kesadaran politik warga negara, legitimasi pemerintah semakin menuntut mekanisme yang lebih kompleks daripada sekadar kemenangan elektoral. Partisipasi publik yang bermakna serta akuntabilitas politik yang transparan dan efektif menjadi dua pilar utama yang menopang legitimasi tersebut. Tanpa keterlibatan aktif masyarakat dan mekanisme pengawasan yang kuat,

demokrasi dapat kehilangan substansinya dan bergeser ke arah formalitas belaka (Srimulyani *et al.*, 2024).

Perkembangan demokrasi modern tidak dapat dilepaskan dari tuntutan masyarakat yang semakin kritis. Masyarakat saat ini memiliki akses luas terhadap informasi melalui media digital, yang memungkinkan mereka menilai dan mengawasi kebijakan pemerintah secara langsung. Konsep legitimasi kini tidak hanya mengacu pada aspek prosedural, seperti pemilu yang bebas dan adil, tetapi juga pada dimensi substantif yang mencakup kesejahteraan, keadilan sosial, dan perlindungan hak-hak dasar. Ketika pemerintah gagal memenuhi harapan ini, krisis kepercayaan dapat muncul, yang berpotensi memicu instabilitas politik dan sosial. Dalam konteks ini, legitimasi pemerintah bukan hanya persoalan hukum atau konstitusional, tetapi juga terkait erat dengan etika politik, responsivitas kebijakan, dan kemampuan pemerintah untuk membangun dialog dengan rakyat (Permatasari *et al.*, 2025).

Partisipasi publik memainkan peran penting dalam memperkuat legitimasi pemerintah. Dalam demokrasi modern, partisipasi tidak lagi terbatas pada kehadiran di tempat pemungutan suara saat pemilu. Keterlibatan warga negara kini meliputi berbagai bentuk, mulai dari diskusi publik, forum deliberatif, konsultasi kebijakan, hingga gerakan sosial yang memperjuangkan isu-isu tertentu. Mekanisme partisipasi semacam ini memungkinkan masyarakat untuk berperan aktif dalam menentukan arah kebijakan publik, sekaligus memberikan umpan balik yang konstruktif bagi pemerintah. Dengan demikian, partisipasi publik bukan sekadar hak politik, tetapi juga instrumen penting untuk memastikan kebijakan pemerintah sesuai dengan aspirasi masyarakat (Asgar, 2023a).

Namun, partisipasi publik yang efektif memerlukan prasyarat tertentu. Di satu sisi, pemerintah harus menyediakan ruang partisipasi yang inklusif dan non-diskriminatif. Di sisi lain, masyarakat perlu memiliki literasi politik yang memadai untuk dapat berkontribusi secara substansial. Tanpa literasi yang memadai, partisipasi publik dapat terjebak dalam polarisasi atau manipulasi informasi, yang pada akhirnya justru melemahkan legitimasi pemerintah. Oleh karena itu, pembangunan kapasitas politik masyarakat melalui pendidikan kewarganegaraan, penguatan media independen, dan promosi nilai-nilai demokratis menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas partisipasi (Sofwan, 2022).

Selain partisipasi publik, akuntabilitas politik juga merupakan elemen kunci yang menentukan legitimasi pemerintah. Akuntabilitas mengacu pada kewajiban pemerintah untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan kebijakan serta tindakan mereka kepada publik. Dalam demokrasi modern, akuntabilitas dapat diwujudkan melalui berbagai mekanisme formal dan informal. Mekanisme formal meliputi pengawasan oleh lembaga legislatif, sistem peradilan yang independen, dan lembaga audit negara. Sementara itu, mekanisme informal dapat berupa pengawasan masyarakat sipil, media independen, dan aktivisme publik. Ketika mekanisme akuntabilitas berfungsi dengan baik, kepercayaan publik terhadap pemerintah akan meningkat, karena masyarakat merasa suara mereka didengar dan hak-hak mereka dilindungi (Asgar, 2023b).

Namun, tantangan dalam penerapan akuntabilitas politik tidak sedikit. Di beberapa negara demokrasi modern, praktik korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan lemahnya transparansi menjadi faktor yang mengikis legitimasi pemerintah. Selain itu, disinformasi yang tersebar luas melalui media sosial dapat mempersulit publik untuk menilai kebenaran kebijakan dan tindakan pemerintah. Dalam konteks ini, penguatan mekanisme akuntabilitas politik perlu disertai dengan upaya melawan disinformasi, memperkuat independensi media, dan membangun budaya politik yang menghormati nilai-nilai etika dan integritas (Putra *et al.*, 2025).

Hubungan antara partisipasi publik dan akuntabilitas politik bersifat saling menguatkan. Partisipasi publik yang tinggi akan mendorong pemerintah untuk lebih akuntabel, sementara akuntabilitas yang kuat akan meningkatkan motivasi masyarakat untuk berpartisipasi. Misalnya, ketika warga merasa bahwa pendapat mereka benar-benar diperhitungkan dalam proses pengambilan keputusan, mereka akan lebih termotivasi untuk terlibat dalam diskusi publik atau memberikan masukan kebijakan. Sebaliknya, jika pemerintah menunjukkan keterbukaan dan kesediaan untuk mempertanggungjawabkan tindakannya, masyarakat akan merasa lebih percaya dan cenderung memperkuat legitimasi politik (Haryatmoko, 2021).

Dalam konteks globalisasi, dinamika legitimasi pemerintah semakin kompleks. Arus informasi lintas batas dan perbandingan antarnegara memungkinkan masyarakat untuk menilai kinerja pemerintahnya secara lebih kritis. Misalnya, praktik-praktik pemerintahan yang efektif di negara lain dapat menjadi tolok ukur yang mempengaruhi ekspektasi publik di dalam negeri. Selain itu, isu-isu global seperti perubahan iklim, migrasi, dan ketidaksetaraan ekonomi memerlukan kerja sama internasional dan respons kebijakan yang cepat. Pemerintah yang gagal menanggapi isu-isu ini dengan baik dapat kehilangan legitimasi, tidak hanya di mata rakyatnya, tetapi juga dalam komunitas internasional (Trianjaya, 2024).

Di sisi lain, populisme dan disinformasi menjadi ancaman nyata bagi legitimasi demokrasi modern. Populisme sering kali mengeksploitasi ketidakpuasan masyarakat terhadap elit politik dan institusi formal dengan menawarkan solusi sederhana untuk masalah yang kompleks. Sementara itu, disinformasi dapat merusak kepercayaan publik dengan menyebarkan narasi yang salah atau menyesatkan. Dalam situasi seperti ini, baik partisipasi publik maupun akuntabilitas politik dapat mengalami distorsi. Misalnya, partisipasi publik yang didorong oleh informasi palsu dapat mengarah pada pengambilan kebijakan yang tidak rasional, sementara mekanisme akuntabilitas dapat dilemahkan oleh tekanan politik populis (Suriadi, 2025).

Untuk menghadapi tantangan tersebut, demokrasi modern perlu mengadopsi inovasi dalam tata kelola pemerintahan. Teknologi digital, misalnya, dapat dimanfaatkan untuk memperluas ruang partisipasi publik melalui platform daring yang memungkinkan konsultasi kebijakan secara lebih inklusif. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi pemerintah melalui publikasi data dan informasi kebijakan secara real-time. Namun, pemanfaatan teknologi juga memerlukan pengawasan ketat untuk mencegah penyalahgunaan data dan pelanggaran privasi yang dapat merusak kepercayaan publik (Hilmy, 2020).

Peran lembaga-lembaga independen dan masyarakat sipil menjadi semakin penting dalam menjaga legitimasi pemerintah. Lembaga yudikatif yang bebas dari intervensi politik, media yang bertanggung jawab, serta organisasi masyarakat sipil yang aktif dapat menjadi penyeimbang kekuasaan pemerintah. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra pemerintah dalam membangun dialog konstruktif dengan masyarakat. Dalam demokrasi modern, keberadaan lembaga-lembaga ini adalah indikator penting dari kualitas legitimasi pemerintah (Maritza & Taufiqurokhman, 2024).

Secara historis, banyak kasus menunjukkan bahwa legitimasi pemerintah yang lemah dapat mengarah pada krisis politik dan sosial. Misalnya, protes besar-besaran di beberapa negara sering kali dipicu oleh ketidakpuasan terhadap pemerintah yang dianggap tidak responsif atau tidak akuntabel. Sebaliknya, negara-negara yang berhasil memperkuat legitimasi pemerintah melalui partisipasi publik dan akuntabilitas politik cenderung lebih stabil dan mampu menghadapi tantangan global dengan lebih baik. Pengalaman-pengalaman ini menjadi pelajaran penting bagi demokrasi modern untuk terus memperbaiki mekanisme tata kelolanya.

Lebih jauh lagi, legitimasi pemerintah juga terkait erat dengan pembangunan sosial dan ekonomi. Pemerintah yang legitim cenderung memiliki kapasitas yang lebih besar untuk menerapkan kebijakan pembangunan jangka panjang yang didukung oleh masyarakat. Sebaliknya, pemerintah yang legitimasi politiknya diragukan sering kali menghadapi hambatan dalam mengimplementasikan kebijakan, bahkan ketika kebijakan tersebut penting untuk kesejahteraan publik. Oleh karena itu, legitimasi pemerintah bukan hanya persoalan politik, tetapi juga faktor kunci dalam pembangunan berkelanjutan.

Dalam demokrasi modern, pendidikan politik dan kesadaran kewarganegaraan memegang peran vital dalam memperkuat legitimasi. Pendidikan politik membantu masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka, serta mendorong partisipasi yang bertanggung jawab. Kesadaran ini akan menciptakan lingkungan politik yang lebih sehat, di mana kebijakan pemerintah dinilai berdasarkan kualitas dan dampaknya, bukan sekadar retorika atau kepentingan jangka pendek. Dalam jangka panjang, masyarakat yang berpendidikan politik baik akan lebih mampu menjaga demokrasi dari ancaman populisme dan disinformasi.

Pendekatan interdisipliner juga diperlukan untuk memahami legitimasi pemerintah dalam demokrasi modern. Ilmu politik, sosiologi, hukum, dan ilmu komunikasi dapat memberikan perspektif yang saling melengkapi. Misalnya, ilmu politik dapat menjelaskan mekanisme kekuasaan dan pengambilan keputusan, sosiologi dapat menyoroti dinamika sosial dan budaya, hukum dapat memberikan kerangka normatif, sementara ilmu komunikasi dapat membantu memahami peran media dan teknologi informasi. Pendekatan semacam ini penting untuk menangkap kompleksitas legitimasi pemerintah dalam konteks global yang terus berubah.

Pada akhirnya, legitimasi pemerintah dalam perspektif demokrasi modern bukanlah konsep statis. Ia terus berkembang seiring dengan perubahan nilai-nilai masyarakat, perkembangan teknologi, dan dinamika politik global. Pemerintah perlu beradaptasi dengan tuntutan baru, seperti keterbukaan, partisipasi yang lebih luas, dan akuntabilitas yang lebih tinggi. Di sisi lain, masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk berpartisipasi secara konstruktif dan menjaga nilai-nilai demokrasi. Hubungan timbal balik antara pemerintah dan rakyat ini menjadi inti dari legitimasi yang berkelanjutan.

Pendahuluan ini menegaskan bahwa partisipasi publik dan akuntabilitas politik bukan sekadar aspek tambahan dalam demokrasi, tetapi merupakan prasyarat utama bagi legitimasi pemerintah. Tanpa kedua elemen ini, demokrasi berisiko terjebak dalam formalitas prosedural tanpa substansi yang nyata. Dengan memperkuat partisipasi dan akuntabilitas, pemerintah dapat membangun kepercayaan publik yang lebih kokoh, memperkuat stabilitas politik, dan memastikan bahwa demokrasi tetap relevan di tengah tantangan abad ke-21. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika legitimasi pemerintah, sekaligus menawarkan kontribusi teoretis dan praktis untuk pengembangan tata kelola pemerintahan yang lebih responsif, inklusif, dan transparan.

Dengan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya legitimasi pemerintah, partisipasi publik, dan akuntabilitas politik, demokrasi modern dapat terus berkembang sebagai sistem yang tidak hanya mewakili kehendak rakyat secara formal, tetapi juga mampu mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan kepercayaan publik dalam jangka panjang. Pendahuluan ini menjadi landasan untuk pembahasan lebih lanjut mengenai bagaimana mekanisme partisipasi publik dan akuntabilitas politik dapat dianalisis secara kritis guna memperkuat legitimasi pemerintah dalam menghadapi dinamika politik global yang semakin kompleks.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan memanfaatkan telaah pustaka kritis untuk memahami hubungan antara partisipasi publik dan akuntabilitas politik dalam memperkuat legitimasi pemerintah. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali makna, pola, dan dinamika yang terkait dengan legitimasi pemerintah secara mendalam tanpa memanipulasi variabel yang diteliti. Sumber data utama diperoleh melalui analisis literatur relevan, termasuk jurnal ilmiah, buku-buku teori politik, laporan organisasi internasional, serta hasil penelitian sebelumnya yang membahas partisipasi publik, akuntabilitas politik, dan legitimasi pemerintahan. Pemilihan sumber dilakukan secara purposif untuk memastikan relevansi dan kredibilitas informasi yang dianalisis.

Proses analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi (content analysis) yang berfokus pada pengidentifikasian tema-tema kunci, pola hubungan, dan konteks sosial-politik yang memengaruhi legitimasi pemerintah. Data yang diperoleh kemudian dikategorikan berdasarkan indikator partisipasi publik (misalnya pemilu, forum deliberatif, dan gerakan sosial) serta mekanisme akuntabilitas politik (seperti pengawasan parlemen, media independen, dan sistem hukum yang adil). Temuan dianalisis secara deskriptif untuk menyoroti keterkaitan kedua variabel tersebut dan implikasinya terhadap penguatan legitimasi pemerintah. Pendekatan ini diharapkan menghasilkan pemahaman komprehensif tentang pentingnya inovasi tata kelola pemerintahan dan respons terhadap tuntutan masyarakat modern di era globalisasi dan keterbukaan informasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Legitimasi pemerintah dalam perspektif demokrasi modern adalah konsep yang tidak dapat dipandang secara sederhana. Ia mencerminkan hubungan dinamis antara pemerintah dan rakyat, di mana kepercayaan publik, partisipasi politik, dan akuntabilitas menjadi penentu utama kualitas demokrasi. Dalam dunia yang semakin terhubung dan transparan, legitimasi bukan hanya tentang memperoleh mandat melalui pemilu, tetapi juga tentang kemampuan pemerintah untuk merespons tuntutan masyarakat, menjalankan kebijakan secara adil, dan mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang diambil. Pembahasan ini menyoroti peran partisipasi publik dan akuntabilitas politik sebagai dua pilar fundamental dalam memperkuat legitimasi pemerintah, serta tantangan yang muncul dalam konteks globalisasi, populisme, dan era digital.

Pertama, partisipasi publik adalah instrumen penting untuk membangun legitimasi. Demokrasi modern tidak lagi memandang partisipasi sebatas hak untuk memilih pemimpin setiap beberapa tahun. Partisipasi kini dipahami sebagai keterlibatan berkelanjutan warga negara dalam proses politik dan pengambilan keputusan. Bentuk-bentuk partisipasi publik sangat beragam, mulai dari pemilu, referendum, musyawarah warga, petisi daring, hingga demonstrasi damai. Dalam konteks demokrasi deliberatif, forum-forum dialog publik memungkinkan masyarakat memberikan masukan langsung terkait kebijakan, sementara teknologi digital memperluas akses partisipasi melalui platform daring. Dengan demikian, partisipasi publik berfungsi sebagai mekanisme pengawasan sosial yang efektif, yang tidak hanya memperkuat kebijakan pemerintah tetapi juga mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan.

Namun, partisipasi publik juga menghadapi tantangan. Ketimpangan sosial-ekonomi dapat memengaruhi kualitas partisipasi, karena kelompok-kelompok tertentu memiliki akses dan sumber daya lebih besar untuk menyuarakan kepentingannya. Selain itu, disinformasi dan polarisasi politik dapat menyesatkan opini publik, sehingga keputusan kolektif tidak selalu

didasarkan pada pertimbangan rasional. Oleh karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan partisipasi yang inklusif, mengurangi hambatan struktural, dan menyediakan informasi yang akurat dan transparan. Pendidikan politik dan literasi digital juga penting untuk memperkuat kapasitas masyarakat dalam berpartisipasi secara konstruktif.

Kedua, akuntabilitas politik adalah mekanisme krusial untuk mempertahankan legitimasi. Dalam demokrasi modern, akuntabilitas tidak hanya terkait dengan mekanisme formal seperti pengawasan parlemen, audit publik, atau sistem peradilan, tetapi juga mencakup mekanisme informal melalui peran media independen, organisasi masyarakat sipil, dan aktivisme sosial. Akuntabilitas berarti bahwa pejabat publik harus menjelaskan keputusan mereka, menerima kritik, dan bersedia mengubah kebijakan yang tidak efektif atau merugikan. Ketika akuntabilitas berjalan dengan baik, kepercayaan publik terhadap pemerintah meningkat, dan legitimasi politik diperkuat.

Namun, tantangan akuntabilitas juga signifikan. Di banyak negara, korupsi, nepotisme, dan lemahnya supremasi hukum menjadi faktor utama yang mengikis legitimasi pemerintah. Selain itu, tekanan politik, konflik kepentingan, dan kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran publik sering kali melemahkan mekanisme pengawasan. Dalam konteks globalisasi, kompleksitas kebijakan lintas batas juga menyulitkan publik untuk memahami dan menilai tindakan pemerintah. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan penguatan institusi demokrasi, peraturan antikorupsi yang tegas, serta perlindungan terhadap kebebasan pers. Teknologi digital juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat akuntabilitas, misalnya melalui sistem pelaporan publik, pemantauan anggaran secara daring, atau pelacakan kinerja kebijakan.

Hubungan antara partisipasi publik dan akuntabilitas politik bersifat sinergis. Partisipasi publik yang luas mendorong pemerintah untuk lebih bertanggung jawab, sementara akuntabilitas yang baik meningkatkan motivasi warga untuk berpartisipasi. Sebagai contoh, ketika masyarakat mengetahui bahwa suara mereka berpengaruh dan kebijakan pemerintah dapat dievaluasi secara terbuka, mereka akan lebih bersemangat untuk terlibat dalam proses politik. Sebaliknya, jika akuntabilitas lemah dan pemerintah tidak transparan, partisipasi publik dapat menurun, dan kepercayaan terhadap institusi demokrasi melemah. Dalam jangka panjang, kondisi semacam ini dapat memicu apatisme politik, ketidakpuasan sosial, bahkan krisis legitimasi.

Selain itu, legitimasi pemerintah juga sangat dipengaruhi oleh konteks globalisasi dan era digital. Globalisasi mempercepat arus informasi dan memudahkan perbandingan lintas negara. Masyarakat kini dapat membandingkan kualitas pelayanan publik, transparansi, dan efektivitas kebijakan antara negaranya dengan negara lain. Jika pemerintah gagal memenuhi ekspektasi tersebut, legitimasi mereka dapat terganggu. Sementara itu, era digital membawa peluang dan risiko. Di satu sisi, teknologi digital mempermudah partisipasi publik dan meningkatkan transparansi. Di sisi lain, penyebaran disinformasi, ujaran kebencian, dan manipulasi opini publik melalui media sosial dapat melemahkan akuntabilitas dan memperburuk polarisasi politik. Untuk itu, demokrasi modern perlu mengadopsi regulasi yang seimbang: melindungi kebebasan berekspresi sambil menekan penyalahgunaan teknologi.

Contoh empiris menunjukkan bahwa negara-negara dengan partisipasi publik yang tinggi dan mekanisme akuntabilitas yang kuat cenderung memiliki legitimasi pemerintah yang stabil. Negara-negara Skandinavia, misalnya, dikenal dengan sistem demokrasi yang transparan, kebijakan inklusif, dan keterlibatan aktif warganya dalam pengambilan keputusan. Sebaliknya, di negara-negara dengan korupsi tinggi dan ruang partisipasi publik yang sempit, legitimasi pemerintah sering kali rapuh dan mudah diguncang oleh protes sosial. Fenomena ini menegaskan

pentingnya memperkuat fondasi demokrasi bukan hanya pada aspek prosedural, tetapi juga pada substansi yang menyentuh kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Dalam konteks negara berkembang, tantangan legitimasi pemerintah sering kali terkait dengan kapasitas institusional yang terbatas, ketimpangan sosial, dan tekanan politik internal. Banyak pemerintah menghadapi dilema antara memenuhi tuntutan pembangunan ekonomi jangka pendek dan menjaga prinsip-prinsip demokrasi. Dalam situasi semacam ini, partisipasi publik dan akuntabilitas politik sering kali dianggap menghambat efisiensi kebijakan. Namun, penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang dibuat tanpa melibatkan publik atau tanpa pengawasan yang memadai cenderung kurang efektif dan rentan menimbulkan konflik. Oleh karena itu, investasi dalam penguatan institusi demokrasi dan pemberdayaan masyarakat adalah langkah penting untuk membangun legitimasi jangka panjang.

Selain itu, nilai-nilai etika politik memainkan peran besar dalam membentuk legitimasi pemerintah. Pemerintahan yang etis—yang mengutamakan integritas, keadilan, dan kepentingan umum—akan lebih mudah mendapatkan kepercayaan publik. Di sisi lain, praktik politik yang transaksional, manipulatif, atau diskriminatif akan merusak legitimasi, meskipun mekanisme formal demokrasi masih berjalan. Dalam hal ini, pemimpin politik memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga etika pemerintahan, sementara masyarakat perlu kritis dan aktif dalam mengawasi praktik politik.

Dari sudut pandang teoritis, legitimasi pemerintah juga dipengaruhi oleh interaksi antara dimensi prosedural dan dimensi substantif demokrasi. Dimensi prosedural mencakup mekanisme formal seperti pemilu, hukum, dan aturan main politik. Dimensi substantif, di sisi lain, menyangkut realisasi nilai-nilai demokrasi seperti keadilan sosial, kesejahteraan, dan perlindungan hak asasi manusia. Pemerintah yang hanya fokus pada prosedur formal tanpa memperhatikan substansi demokrasi dapat menghadapi krisis legitimasi, terutama ketika kebijakan-kebijakan yang dihasilkan tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, keseimbangan antara prosedur dan substansi sangat penting dalam menjaga legitimasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Legitimasi pemerintah dalam perspektif demokrasi modern tidak dapat dilepaskan dari peran krusial partisipasi publik dan akuntabilitas politik. Kedua elemen ini membentuk hubungan timbal balik yang memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan menjaga stabilitas demokrasi. Partisipasi publik yang inklusif dan bermakna memungkinkan masyarakat menyuarakan aspirasi mereka, memberi masukan terhadap kebijakan, dan mengawasi kinerja pemerintah. Sementara itu, akuntabilitas politik memastikan bahwa kekuasaan tidak disalahgunakan, kebijakan dapat dipertanggungjawabkan, dan kepentingan publik tetap menjadi prioritas.

Dalam konteks globalisasi dan era digital, legitimasi pemerintah menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Arus informasi yang cepat memungkinkan masyarakat menilai kinerja pemerintah secara lebih kritis, tetapi juga membuka peluang penyebaran disinformasi yang dapat merusak kepercayaan publik. Populisme dan polarisasi politik dapat mengganggu proses demokratis jika tidak diimbangi oleh literasi politik yang kuat dan mekanisme pengawasan yang efektif. Oleh karena itu, pemerintah modern harus mengadopsi pendekatan inovatif dalam tata kelola pemerintahan, memanfaatkan teknologi untuk memperluas partisipasi dan transparansi, sekaligus menjaga integritas proses politik dari penyalahgunaan informasi.

Kesuksesan demokrasi modern tidak hanya diukur melalui prosedur formal seperti pemilu, tetapi juga melalui kemampuannya menghadirkan kebijakan yang adil, responsif, dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Pemerintah yang legitim akan lebih mudah memperoleh dukungan publik dalam menjalankan kebijakan strategis, bahkan ketika kebijakan tersebut menuntut pengorbanan jangka pendek demi kepentingan jangka panjang. Sebaliknya, krisis legitimasi dapat melemahkan stabilitas politik, menghambat pembangunan, dan memicu ketidakpuasan sosial.

Dengan demikian, memperkuat legitimasi pemerintah melalui partisipasi publik dan akuntabilitas politik bukan sekadar pilihan, tetapi kebutuhan mendasar bagi kelangsungan demokrasi. Upaya ini memerlukan komitmen kolektif: pemerintah harus terbuka, transparan, dan bertanggung jawab, sementara masyarakat harus aktif, kritis, dan berorientasi pada kepentingan bersama. Dalam menghadapi tantangan abad ke-21—mulai dari perubahan iklim hingga ketidaksetaraan ekonomi—hanya pemerintah yang memiliki legitimasi kuat yang mampu memimpin dengan efektif dan adil.

Kajian ini menegaskan bahwa legitimasi pemerintah adalah proses yang dinamis dan berkelanjutan. Demokrasi modern menuntut interaksi yang sehat antara negara dan warga negara, di mana dialog, partisipasi, dan pengawasan menjadi bagian dari kehidupan politik sehari-hari. Dengan memperkuat dua pilar utama—partisipasi publik dan akuntabilitas politik—pemerintah dapat memastikan bahwa kekuasaan yang dimilikinya benar-benar mencerminkan kehendak rakyat dan dijalankan untuk kesejahteraan bersama. Di sinilah inti dari legitimasi dalam demokrasi modern: kekuasaan yang diterima bukan karena dipaksakan, tetapi karena dipercaya, dipahami, dan didukung oleh mereka yang diperintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Asgar, S. (2023a). Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu dan Pilkada Sebagai Dasar Legitimasi Kekuasaan Pemerintah. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(3), 5982–5994.
- Asgar, S. (2023b). Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu dan Pilkada Sebagai Dasar Legitimasi Kekuasaan Pemerintah. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(3), 5982–5994.
- Haryatmoko, J. (2021). Tanggungjawab Etis Partai Politik: Memperluas Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Publik. *A. Nawawi, Sinergi Penegakan Etika Kelembagaan*, 119.
- Hilmy, M. I. (2020). Fenomena Gerakan Populisme Dalam Kemunduran Demokrasi. *Jurnal Civic Hukum*, 5(2), 145–156.
- Maritza, D. F., & Taufiqurokhman, T. (2024). Peranan masyarakat sipil dalam peningkatan akuntabilitas birokrasi melalui pengawasan publik yang aktif. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 14(1), 71–84.
- Permatasari, T., Hijroti, Z., Aulia, N., Millah, S., Putri, D. R., & Amali, A. F. (2025). *Sejarah Perkembangan Demokrasi Dan Pelembagaaan Demokrasi*. Penerbit: Kramantara JS.
- Putra, J. A., Permata, D., Djani, A. I., Sabetu, D. L., Finit, Y. N., & Mas'ud, F. (2025). Evaluasi Penerapan Prinsip Good Governance dalam Sistem Pemerintahan Indonesia: Tantangan dan Peluang dalam Mengatasi Kesewenang-wenangan. *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, 3(02), 1239–1251.
- Sofwan, S. (2022). Urgensi Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *Jatiswara*, 37(1), 118–126.

- Srimulyani, E., Nurhanisyyah, S., & Assondani, M. M. N. U. (2024). Islam and Democracy: A Comparative Study Between the Islamic System of Governance and Modern Democracy: Islam dan Demokrasi: Studi Komparatif antara Sistem Pemerintahan Islam dan Demokrasi Modern. *JSPH: Jurnal Sosial Politik Humaniora*, 1(1).
- Suriadi, H. (2025). Krisis Kepercayaan Masyarakat terhadap Lembaga Publik di Era Disinformasi Digital. *Journal of Social, Education and Religious Studies*, 1(1).
- Trianjaya, M. I. (2024). Penerapan Hukum Tata Negara dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia: Tantangan dalam Dinamika Politik Kontemporer. *El-Siyasa: Journal of Constitutional Law*, 2(1), 29–38.